

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pengembangan ekonomi dapat dipahami sebagai kumpulan upaya dalam perekonomian untuk memajukan aktivitas ekonomi, sehingga infrastruktur lebih meluas, jumlah perusahaan bertambah dan berkembang, kualitas pendidikan meningkat, serta teknologi semakin canggih. Harapan dari evolusi ini adalah peningkatan peluang kerja, kenaikan pendapatan, serta peningkatan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2013).

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang tidak hanya terbatas pada aspek-aspek ekonomi saja. Proses ini mencakup berbagai dimensi yang lebih beragam dan kompleks, seperti sosial, politik, kelembagaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, tujuan utama tidak hanya terfokus pada pertumbuhan dan pemerataan, tetapi juga pada pengaruh aktivitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat, lingkungan, serta kualitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang ingin dicapai.

Sampai saat ini, berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi telah menunjukkan bahwa belum terdapat teori pembangunan ekonomi yang universal yang dapat diaplikasikan secara efektif di seluruh negara di dunia. Perbedaan ini tampaknya terkait dengan keadaan alam, perilaku, dan sumber daya yang dimiliki oleh tiap negara yang beragam dan tidak seragam. Variasi dalam kondisi alam, perilaku, dan sumber daya yang dimiliki tiap-tiap negara seringkali mengakibatkan kegagalan dalam penerapan teori-teori pembangunan ekonomi yang telah ada (Amir, 2007).

Kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang proporsional dengan jumlah angkatan kerja yang mencari kesempatan pekerjaan menyebabkan bertambahnya angka pengangguran (Sukirno, 2008). Di Indonesia, permasalahan pengangguran adalah isu serius yang dihadapi. Kondisi ini timbul dari ketidakseimbangan yang terjadi di pasar angkatan kerja, dimana jumlah angkatan kerja yang tersedia melebihi jumlah yang dibutuhkan; dengan kata lain, jumlah penawaran angkatan kerja melampaui jumlah permintaan yang ada. Teorinya, kelebihan ini dalam

penawaran dibandingkan dengan permintaan di pasar kerja menjadi penyebab utama terjadinya pengangguran.

Pemicu utama pengangguran terletak pada ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja yang ada dan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk. Ini menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja melebihi lapangan kerja yang tersedia, akibatnya beberapa individu gagal memperoleh pekerjaan. Faktor lain yang berkontribusi terhadap pengangguran meliputi penawaran upah oleh perusahaan yang tidak memenuhi ekspektasi pekerja, pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah dibandingkan dengan peningkatan angkatan kerja, tekanan demografis dari tingginya jumlah angkatan kerja, kualifikasi yang dimiliki pekerja tidak sesuai dengan kebutuhan posisi yang ada, pengurangan jumlah pegawai akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil atau kondisi keamanan yang kurang aman, kendala dalam kegiatan ekspor dan impor, regulasi yang menghambat investasi, serta ketidakefektifan informasi pasar kerja. Selain itu, iklim investasi yang belum mendukung penuh, rendahnya tingkat pendidikan, resesi ekonomi, adopsi teknologi yang mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia, kebijakan pemerintah yang menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, serta persaingan di pasar global, di mana banyak perusahaan, khususnya perusahaan asing di Indonesia, lebih memilih tenaga kerja dari luar negeri yang dianggap lebih kompeten dibandingkan dengan tenaga kerja lokal, juga turut memperparah kondisi pengangguran (Mankiw, 2014).

Pada dasarnya, pembangunan ekonomi merupakan kumpulan tindakan strategis yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperbanyak peluang pekerjaan, dan mendistribusikan pendapatan secara lebih adil. Keynes menyatakan bahwa kondisi makro dari pembangunan ekonomi suatu negara ditandai oleh perubahan dalam permintaan agregat yang dimiliki oleh masyarakat. Di Indonesia, menciptakan peluang kerja masih merupakan tantangan krusial dalam pembangunan ekonomi. Isu ini muncul akibat disparitas atau ketidakseimbangan dalam akses terhadap kesempatan kerja tersebut. Inti dari masalah ini adalah ketidakcocokan antara laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja dengan kemampuan berbagai sektor ekonomi untuk menampung tenaga kerja tersebut

(Jhingan, 2014). Untuk mengurangi angka pengangguran, sangat penting untuk memperluas kesempatan kerja. Ekspansi kesempatan kerja yang produktif tidak sekadar terkait dengan pembukaan lapangan kerja baru, melainkan juga peningkatan efisiensi tenaga kerja. Peningkatan efisiensi ini, pada gilirannya, dapat menurunkan tingkat pengangguran. Berikut disajikan data tingkat pengangguran di Pulau Sumatera dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Berdasarkan Provinsi Pulau Sumatera (%)

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Aceh	6,34	6,17	6,59	6,30	6,17	6,31
Sumatera Utara	5,55	5,39	6,91	6,33	6,16	6,07
Sumatera Barat	5,66	5,38	6,88	6,52	6,28	6,14
Riau	5,98	5,76	6,32	4,42	4,37	5,37
Jambi	3,73	4,06	5,13	5,09	4,59	4,52
Sumatera Selatan	4,27	4,53	5,51	4,98	4,63	4,78
Bengkulu	3,35	3,26	4,07	3,65	3,59	3,58
Lampung	4,04	4,03	4,67	4,69	4,52	4,39
Kepulauan Bangka Belitung	3,61	3,58	5,25	5,03	4,77	4,45
Kepulauan Riau	8,04	7,50	10,34	9,91	8,23	8,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023

Persentase individu yang tidak memiliki pekerjaan dari total angkatan kerja dinamakan tingkat pengangguran. Definisi dari angkatan kerja meliputi mereka yang berusia antara 15 sampai 64 tahun. Berdasarkan data yang tercatat pada Tabel 1.1, selama lima tahun, dari 2018 hingga 2022, Provinsi Jambi memiliki tingkat pengangguran yang mencapai posisi ke-tujuh tertinggi di antara sepuluh provinsi lain di Pulau Sumatera. Fakta ini menggambarkan komitmen serius pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran melalui berbagai strategi yang telah diimplementasikan.

Pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis untuk menurunkan tingkat pengangguran, termasuk membangun lebih banyak peluang kerja, memodifikasi iklim untuk investasi, memperkenalkan serangkaian stimulus

ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengendalikan inflasi, serta memastikan bahwa angkatan kerja dapat bekerja secara optimal. Kebijakan ini berdampak positif dalam meratakan pembangunan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Latifa dan Pribadi, 2021).

Untuk menurunkan tingkat pengangguran, pemerintah memiliki berbagai opsi strategis, sebagaimana diungkapkan oleh Mulyadi (2014). Strategi-strategi tersebut meliputi: 1) Peningkatan jumlah program magang untuk angkatan kerja yang potensial. 2) Pemajuan kualitas angkatan kerja. 3) Penciptaan peluang pekerjaan yang lebih luas untuk warga. 4) Peningkatan kesejahteraan bagi angkatan kerja. 5) Pengembangan sektor informal. 6) Pelaksanaan program transmigrasi. 7) Peningkatan investasi. Di samping langkah-langkah pemerintah tersebut, pengurangan tingkat pengangguran juga dapat dicapai melalui peningkatan kualitas angkatan kerja yang dilakukan secara mandiri. Peningkatan ini dapat diwujudkan dengan memanfaatkan ragam pelatihan yang tersedia melalui platform online.

Di Provinsi Jambi, yang terdiri dari sembilan kabupaten dan dua kota, upaya pengurangan tingkat pengangguran belum menunjukkan hasil yang efektif karena implementasi kebijakan oleh pemerintah yang belum merata. Tingginya jumlah pengangguran dibandingkan dengan peluang pekerjaan yang berhasil diisi menandakan bahwa pemerintah masih dalam proses mencari pendekatan strategis untuk membuat kebijakan yang efektif dalam menurunkan tingkat pengangguran di setiap wilayah. Data mengenai tingkat pengangguran di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Pengangguran di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 (%)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Kerinci	2,74	2,62	2,43	2,32	2,63	2,55
Merangin	3,47	3,68	4,86	4,83	4,69	4,31
Sarolangun	4,05	4,09	5,71	5,52	5,22	4,92
Batanghari	3,87	4,56	4,42	4,26	3,53	4,13

Muaro Jambi	4,52	5,20	5,43	5,59	5,35	5,22
Tanjab Timur	1,80	1,63	1,41	1,56	1,32	1,54
Tanjab Barat	2,38	2,57	2,16	2,53	2,88	2,50
Tebo	2,00	2,90	2,95	2,83	1,38	2,41
Bungo	3,03	3,82	5,94	5,86	5,50	4,83
Kota Jambi	6,41	6,53	10,49	10,66	8,95	8,61
Sungai Penuh	5,13	4,00	5,56	3,00	2,49	4,04
Provinsi Jambi	3,58	3,78	4,67	4,45	3,99	4,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Jambi, 2023

Dari Tabel 1.2, dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata persentase pengangguran dalam angkatan kerja adalah 4,10%. Angka ini mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan persentase 4,67% terhadap angkatan kerja, sementara angka terendah dicatat pada tahun 2018, yaitu 3,58%. Tingkat pengangguran di Provinsi Jambi yang terbesar terdapat pada Kota Jambi yaitu rata-rata sebesar 8,61 persen artinya persentase rasio angka jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja sebesar 8,61 persen, dan terendah pada Kabupaten Tanjab Timur yaitu rata-rata sebesar 1,54 persen artinya persentase rasio angka jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja sebesar 1,54 persen. Tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh prevalensi jumlah pengangguran yang melebihi jumlah angkatan kerja. Sebagai indikator vital dalam sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran menunjukkan kapasitas penyerapan angkatan kerja oleh kesempatan kerja yang tersedia.

Faktor pertama terhadap pengangguran diberikan oleh angkatan kerja; penambahan jumlah angkatan kerja akan menyebabkan peningkatan dalam tingkat pengangguran jika tidak didukung oleh pertumbuhan peluang pekerjaan yang proporsional. Masih terdapat gap yang signifikan antara jumlah angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, yang menjadi isu krusial dalam sektor ketenagakerjaan (Sukirno, 2008). Tingkat pengangguran yang tinggi di Provinsi Jambi disebabkan

oleh besar jumlah angkatan kerja di wilayah tersebut. Berikut adalah data angkatan kerja di Provinsi Jambi sesuai dengan tabel 1.3.

Tabel 1.3. Angkatan Kerja di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 (Jiwa)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Kerinci	131.048	123.186	130.354	134.072	139.997	131.731
Merangin	193.443	194.003	200.478	201.890	203.256	198.614
Sarolangun	141.744	140.719	150.337	145.214	151.895	145.981
Batanghari	127.845	119.863	134.209	138.518	129.347	129.956
Muaro Jambi	203.143	193.481	205.889	214.881	235.033	210.485
Tanjab Timur	116.265	113.932	121.606	117.349	120.684	117.967
Tanjab Barat	179.126	170.235	183.820	184.288	177.204	178.934
Tebo	178.534	180.663	186.005	186.808	185.722	183.546
Bungo	177.952	172.645	179.151	178.842	194.319	180.581
Kota Jambi	294.917	303.370	296.273	294.349	303.517	298.485
Sungai Penuh	47.745	42.690	44.871	44.383	43.304	44.598
Provinsi Jambi	1.791.762	1.754.787	1.832.993	1.840.594	1.884.278	1.822.810

Sumber: Badan Pusat Statistik Jambi, 2023

Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi secara rata-rata telah mengalami peningkatan sebanyak 1.822.810 orang selama periode 2018 hingga 2022. Pada tahun 2022, angkatan kerja mencapai puncaknya dengan total 1.884.278 orang, sementara jumlah terkecil tercatat pada tahun 2019, yaitu sebanyak 1.765.747 orang, dikarenakan adanya penurunan jumlah tersebut. Kota Jambi tercatat memiliki angkatan kerja terbanyak, sedangkan Kota Sungai Penuh mencatatkan angkatan kerja terkecil.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran ialah investasi. Investasi berperan signifikan dalam mengintegrasikan angkatan kerja ke dalam ekonomi, di mana jumlah investasi yang dilakukan mempengaruhi kebutuhan akan tenaga kerja. Dari sudut pandang teoretis, peningkatan dalam

jumlah investasi berbanding lurus dengan kenaikan kebutuhan tenaga kerja (Suparmoko, 2008). Investasi berperan sebagai komponen dalam aktivitas ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap penyerapan angkatan kerja. Seiring peningkatan investasi, dampaknya terhadap penurunan tingkat pengangguran akan semakin signifikan. Namun, penurunan dalam investasi cenderung meningkatkan jumlah pengangguran. Data terkait nilai investasi di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4. Jumlah Investasi di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 (Rp.Miliar)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Kerinci	187.206	241.655	256.104	258.554	259.003	240.504
Merangin	137.239	146.415	150.070	193.725	207.379	166.966
Sarolangun	300.487	310.372	320.258	345.143	350.028	325.257
Batanghari	312.780	389.688	393.404	416.495	421.587	386.791
Muaro Jambi	200.913	357.902	364.892	371.882	388.871	336.892
Tanjab Timur	472.555	418.073	423.592	439.111	444.629	439.592
Tanjab Barat	1.242.067	1.134.042	1.120.150	929.871	697.657	1.024.757
Tebo	563.071	494.988	506.905	558.822	590.739	542.905
Bungo	525.016	527.576	529.863	537.303	544.743	532.900
Kota Jambi	453.076	450.819	513.563	326.307	334.050	415.563
Sungai Penuh	107.900	293.886	233.091	242.369	246.950	224.839
Provinsi Jambi	4.502.310	4.765.417	4.811.892	4.619.580	4.485.636	4.636.967

Sumber : Badan Pusat Statistik Jambi, 2023

Seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1.4, selama periode 2018 hingga 2022, total investasi secara keseluruhan di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan rata-rata sejumlah Rp.4.636.967 triliun. Investasi tertinggi tercatat pada tahun 2020, mencapai Rp.4.811.892 triliun, sementara nilai investasi terkecil terjadi pada tahun 2022 dengan angka sebesar Rp.4.485.636 triliun. Dari perspektif jangka panjang, kenaikan dalam investasi memiliki pengaruh terhadap penambahan

stok kapital yang selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas. Di negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi, termasuk Indonesia saat ini, angkatan kerja yang tidak terpakai bisa dijadikan sebagai dasar untuk pembentukan modal.

Faktor ketiga yang berdampak terhadap pengangguran adalah inflasi, yang merupakan persoalan keuangan atau kenaikan harga tahunan. Apabila kondisi tersebut berlanjut, maka akan timbul banyak masalah pengangguran. Tingkat inflasi dan pengangguran merupakan isu-isu utama dalam perekonomian yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah (Jhingan, 2014). Hal ini juga berlaku di Provinsi Jambi, yang notabene mengalami tingkat inflasi yang relatif tinggi dan perlu mendapat pengawasan intensif dari pihak pemerintah. Berikut adalah tingkat inflasi umum yang tercatat di Indonesia pada tabel 1.5.

Tabel 1.5. Perbandingan Inflasi Kabupaten Muaro Bungo, Kota Jambi dengan Inflasi Indonesia Tahun 2018-2022 (%)

Tahun	Inflasi Muaro Bungo	Inflasi Kota Jambi	Inflasi Indonesia
2018	2,46	3,02	3,13
2019	2,61	1,27	2,72
2020	2,32	3,09	1,68
2021	1,65	1,67	1,87
2022	6,04	6,39	5,51
Rata-Rata	3,02	3,09	2,98

Sumber : Badan Pusat Statistika Indonesia, 2023

Diketahui dari Tabel 1.5 bahwa sepanjang tahun 2018 hingga 2022, tingkat inflasi rata-rata di Kabupaten Muaro Bungo adalah 3,02 persen, sementara di Kota Jambi mencapai 3,09 persen. Secara keseluruhan, tingkat inflasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kenaikan inflasi nasional yang sebesar 2,98 persen. Tingkat inflasi yang lebih tinggi di Kabupaten Muaro Bungo dan Kota Jambi dibandingkan dengan inflasi nasional mengindikasikan bahwa inflasi ekspektatif dapat memicu permintaan upah yang lebih tinggi dari tenaga kerja agar pendapatan yang mereka terima dapat menyamai laju inflasi yang ada. Kenaikan upah bagi

angkatan kerja ini, pada gilirannya, dapat memulihkan tingkat pengangguran dalam jangka pendek.

Faktor keempat yang berkontribusi terhadap tingkat pengangguran adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran ini, yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa, secara tidak langsung akan mendorong pembukaan lapangan kerja baru. Dalam menyediakan barang-barang publik, pemerintah secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan. Kesempatan kerja yang tersedia sebagai hasil dari kegiatan pemerintah ini akan dipengaruhi oleh tipe pengeluaran (Arsyad, 2014). Dalam rangka mengatasi masalah pengangguran, kebijakan fiskal pemerintah, khususnya pengeluaran pemerintah yang ekspansif, tampaknya belum memberikan dampak yang berarti. Meskipun pengeluaran pemerintah meningkat setiap tahun, hal ini juga diikuti oleh peningkatan jumlah pengangguran (Kuncoro, 2015). Berbagai faktor dipengaruhi oleh alokasi anggaran pemerintah yang kurang tepat, di mana selama periode tertentu, sebagian besar dana pembangunan diarahkan untuk mendanai proyek-proyek yang memerlukan banyak modal. Hal ini termasuk sistem birokrasi yang tidak efisien, yang mengakibatkan penyelewengan dana, menyebabkan alokasi anggaran pemerintah menjadi kurang akurat, dan secara bertahap meningkatkan jumlah pengangguran setiap tahun. Data terkait pengeluaran pemerintah di Provinsi Jambi disajikan dalam tabel 1.6.

Tabel 1.6. Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 (Rp)

Kabupaten / Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Kerinci	1.181.842.755	1.290.418.835	1.408.461.829	1.229.591.234	1.226.594.369	1.267.381.804
Merangin	1.401.612.272	1.357.642.467	1.497.443.153	1.422.295.189	1.509.156.527	1.437.629.922
Sarolangun	1.264.611.914	1.365.193.291	1.433.000.521	1.221.823.151	1.198.038.773	1.296.533.530
Batanghari	1.207.156.522	1.223.476.264	1.393.999.590	1.019.678.234	1.296.009.823	1.228.064.087
Muaro Jambi	1.290.314.106	1.362.641.442	1.382.424.142	1.391.582.517	1.392.250.190	1.363.842.479
Tanjab Timur	1.167.856.544	1.212.649.259	1.225.249.382	1.095.361.652	1.155.212.766	1.171.265.921
Tanjab Barat	1.505.718.210	1.616.739.173	1.568.057.751	1.390.378.974	1.228.354.538	1.461.849.729
Tebo	1.023.078.134	1.148.064.441	1.157.330.855	1.021.783.331	1.103.676.777	1.090.786.708
Bungo	1.315.050.838	1.375.153.847	1.616.706.122	1.294.680.574	1.513.269.911	1.422.972.258

Kota Jambi	1.635.122.617	1.754.896.149	1.710.612.143	1.667.715.470	2.073.287.429	1.768.326.762
Sungai Penuh	745.030.337	779.750.688	868.042.890	711.305.688	812.837.378	783.393.396
Provinsi Jambi	13.737.394.249	14.486.625.856	15.261.328.378	4.430.392.751	4.516.148.844	10.486.378.016

Sumber : Badan Pusat Statistik Jambi, 2023

Dari Tabel 1.6, terlihat bahwa dari tahun 2018 hingga 2022, rata-rata pengeluaran pemerintah di Provinsi Jambi mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.486.378.016 dengan puncak pengeluaran tertinggi tercapai pada tahun 2022 sejumlah Rp. 15.261.328.378 dan yang terendah pada tahun 2021 sejumlah Rp. 4.430.392.751. Belanja pemerintah yang dialokasikan untuk pembelian barang dan jasa berkontribusi pada penciptaan peluang kerja. Secara tidak langsung, ketika pemerintah berupaya menyediakan barang publik, ini membuka peluang kerja baru. Dampak pengeluaran pemerintah terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan dipengaruhi oleh tipe pengeluaran tersebut. Dalam upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran menggunakan kebijakan fiskal, khususnya melalui peningkatan pengeluaran pemerintah secara ekspansif, hasil yang dicapai tampaknya masih belum memuaskan. Meskipun ada peningkatan tahunan dalam pengeluaran pemerintah, hal ini justru disertai dengan peningkatan jumlah pengangguran.

Dalam durasi yang panjang, persoalan pengangguran diakibatkan oleh jumlah penerimaan tenaga kerja yang tidak mencukupi dibanding dengan angkatan kerja yang ada, mengakibatkan kurangnya upaya dari pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang efektif untuk menurunkan tingkat pengangguran serta menyediakan peluang bagi individu yang telah memiliki pengalaman bekerja atau yang telah siap untuk bekerja. Jumlah penerimaan tenaga kerja terbilang minim jika dibandingkan dengan total angkatan kerja yang ada (Kuncoro, 2015).

Berdasarkan hasil kajian Yulmardi dkk (2020), diungkapkan bahwa faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi, inflasi, investasi, dan upah minimum tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pengangguran, sementara faktor kesempatan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran tersebut. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Yulmardi dkk

(2018), ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi serta investasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengangguran, sedangkan inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap masalah pengangguran. Dalam studi yang dilakukan oleh Zulfanetti dkk (2020), ditemukan bahwa dalam periode jangka pendek, pertumbuhan ekonomi memiliki efek positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, sedangkan inflasi menunjukkan efek yang negatif dan juga tidak signifikan. Lebih lanjut, dalam jangka panjang, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka ternyata positif dan signifikan, sementara pengaruh inflasi masih menunjukkan efek negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Menurut Hardiani dkk (2020), pertumbuhan ekonomi memiliki dampak negatif yang tidak berarti serta peluang kerja memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap jumlah pengangguran yang terpelajar. Heriberta (2018) menyampaikan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Menurut Dewita (2013), sejumlah faktor lain mempengaruhi ketenagakerjaan, di antaranya adalah tingkat investasi yang masih rendah akibat arus masuk modal asing yang tidak optimal, kondisi stabilitas keamanan yang terganggu, sikap proteksionis yang ditunjukkan melalui peringatan-peringatan perjalanan oleh beberapa negara barat terhadap Indonesia, perubahan iklim yang mengakibatkan pemanasan global dan memicu krisis pangan global, kenaikan harga minyak dunia, kondisi pasar global, serta perilaku birokrasi yang tidak mendukung atau malah menghambat pengembangan bisnis, bersamaan dengan tekanan untuk meningkatkan upah buruh di tengah kondisi dunia usaha yang belum pulih. Semua isu tersebut tampaknya sudah dikenali oleh para pembuat kebijakan. Akan tetapi, yang tampak kurang dimengerti adalah bahwa masalah ketenagakerjaan atau pengangguran merupakan masalah yang memiliki banyak dimensi, yang membutuhkan pendekatan yang juga beragam dan kompleks dalam penyelesaiannya.

Mengatasi masalah pengangguran di Provinsi Jambi merupakan tantangan yang kompleks. Pengangguran terus menjadi isu utama karena tingginya jumlah

angkatan kerja dan kepadatan penduduk, yang banyak di antaranya masih tercatat sebagai pengangguran. Penurunan permintaan tenaga kerja dan keterbatasan jumlah lapangan kerja yang tersedia, serta minimnya kesempatan kerja meski terdapat rekrutmen, menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum cukup efektif untuk mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut.

Telah banyak usaha penelitian yang diselenggarakan secara mendalam dan menyeluruh di berbagai sektor ekonomi dengan mempertimbangkan berbagai variabel dalam hubungannya dengan masalah pengangguran, sehingga menjadi penting untuk melakukan penelitian lanjutan dengan melibatkan variabel lain yang relevan agar kualitas hasil penelitian dapat ditingkatkan. Menyadari pentingnya hal tersebut, penulis merasa terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Determinan Pengangguran dan Strategi Mengatasinya di Provinsi Jambi”**.

1.2. Rumusan masalah

Dari pembahasan yang ada di bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pengangguran di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana strategi pengurangan pengangguran di Provinsi Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran di Provinsi Jambi.
2. Untuk menganalisis strategi pengurangan pengangguran di Provinsi Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Akademis
 - a. Pengembangan Ilmu ESDM

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan penting bagi studi terkait ekonomi tenaga kerja manusia, khususnya dalam menangani masalah pengangguran.

b. Penelitian Lanjutan

Diharapkan penelitian ini menjadi referensi berharga untuk studi mendatang dan berperan dalam memperkaya pengetahuan bagi akademisi di bidang ekonomi pembangunan.

2. Praktisi

a. Pengambil Kebijakan

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber pertimbangan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan untuk menurunkan tingkat pengangguran dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya di berbagai Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.

b. Stakeholder Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan strategi dan metode yang efektif untuk memajukan sektor ekonomi di Provinsi Jambi.